

Zaini Rahman 10.31 (1 menit yang lalu)

kepada saya

----- Forwarded message -----

Dari: **Aplikasi e-LHKPN** <statistik@kpk.go.id>

Date: Kam, 30 Jan 2020 10:26

Subject: Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

To: <zainirahman089@gmail.com>

Yth. Sdr ZAINI RAHMAN

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZAINI RAHMAN
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN - PENGADILAN AGAMA
TASIKMALAYA - PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
**Tanggal / Tahun
Pelaporan** : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZAINI RAHMAN
NIK : 3273130103770006
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim : 30 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

- Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-02-13 09:05:05



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINI RAHMAN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 463504

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	225.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	229.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	54.685.714
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	539.185.714
III. HUTANG	Rp.	512.325.215
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.860.499

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.